

Dinamika Budaya Politik Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar pada Pilkada 2020

Mohammad Nasih^{1,*}, Hamka Hendra Noer², Lusi Andriyani^{3,*}, Dewi Erowati⁴,
Dinar Meidiana⁵, Mohamad Sofyan Lausiry⁶

^{1,2,3,5,6} Ilmu Politik, FISIP UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangsel, Banten
⁴Ilmu Pemerintahan, FISIP Undip, Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang

*m.nasih@umj.ac.id

* lusi.andriyani@umj.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dinobatkan sebagai Desa Anti Money Politic oleh Bawaslu RI pada 2020 jelang Pilkada 2020. Penelitian ini mencoba menggambarkan dinamika budaya politik dalam sebuah masyarakat adat yang memiliki karakter patuh terhadap hukum adat. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dengan teknik deskriptif. Melalui kajian literatur, observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki karakter demokratis, serta memiliki orientasi afektif dan evaluatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses musyawarah dalam menentukan pilihan politik yang dilakukan oleh ketua beserta jajaran pimpinan adat, tidak adanya paksaan dalam memilih maupun menggunakan hak suara. Selain itu, masyarakat memiliki partisipasi yang cukup aktif dalam mencari informasi dan berdiskusi untuk melakukan evaluasi pada hasil kepemimpinan sebelumnya.

Kata kunci: budaya politik, masyarakat adat, Pilkada.

ABSTRACT

The Kasepuhan Ciptagelar community was named an Desa Anti Money Politics by Bawaslu RI in 2020 ahead of the Pilkada 2020. This research tries to describe the dynamics of political culture in a traditional community that has the character of obeying customary law. The research was conducted using qualitative methods which were analyzed using descriptive techniques. Through literature studies, observations and interviews conducted, it was found that the Kasepuhan Ciptagelar community has a democratic character, and has an affective and evaluative orientation. This is proven by the existence of a deliberation process in determining political choices carried out by the chairman and the ranks of traditional leaders, there is no coercion in choosing or exercising voting rights. The community has quite active participation in seeking information and discussing to evaluate the results of previous leadership

Keywords: *political culture, indigenous people, Pilkada.*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda penting bagi masyarakat. Bukan hanya sebagai momentum rutin yang dilakukan secara periodik, tapi juga ajang masyarakat sebagai konstituen untuk menentukan nasib dengan cara memilih pemimpin. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya 28E ayat 2 dan 3 yang berbunyi: "(2) Setiap orang berhak atas

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Hak yang tercantum dalam UU Pasal 28 berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tak terkecuali masyarakat adat. Selama masyarakat berada di wilayah administrasi dan diakui secara hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, maka masyarakat

diberikan hak untuk memilih pemimpin. Meskipun masyarakat adat memiliki sistem tersendiri di segala aspek kehidupan, namun masyarakat adat tetap menjadi bagian dari negara yang berada di bawah pemerintahan negara Indonesia.

Dalam sebuah pranata masyarakat, seluruh anggota masyarakat adat terikat pada segala aturan yang diberlakukan oleh sistem pemerintahannya sendiri. Sebagaimana sebuah studi menjelaskan bahwa masyarakat adat dipahami sebagai masyarakat asli (indigenous people) yang telah membangun pemerintahannya sendiri jauh sebelum negara hadir.

Namun keberadaan masyarakat adat bukan berarti bertolak belakang dengan hukum negara. Salah satu masyarakat adat yang cukup terbuka adalah Kasepuhan Ciptagelar yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi. Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar membentuk sistem adat yang cukup terbuka dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditunjukkan dengan partisipasi aktif pemimpin adat dalam agenda bersama lembaga pemerintahan. Kasepuhan Ciptagelar yang pada 2018 tercatat sejumlah 300 kepala keluarga ini memiliki sejarah panjang hingga saat ini mendiami wilayah Sirnaresmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi (Humaeni, dkk. 2018).

Secara historis, nenek moyang Kasepuhan Ciptagelar bukan berasal dari Jawa Barat melainkan Baten. Proses perpindahan lokasi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar terjadi karena pemimpin adat pada masa itu mendapat wangsit untuk berpindah ke tempat yang saat ini dihuni.

Sistem kepercayaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar merupakan ajaran yang diturunkan oleh leluhurnya dan masih dianut hingga saat ini. Nilai, falsafah dan pandangan hidup sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Sari Mawaddahni dalam kajian yang dilakukan Siti Noor Aini menjelaskan bahwa Kasepuhan Ciptagelar tidak menutup diri dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab prinsip yang diwariskan ialah patuh terhadap aturan adat, negara, dan agama. Hal

tersebut disimbolkan dengan ikat kepala laki-laki yang berbentuk segitiga.

Kasepuhan yang menjadi bagian dari Kasepuhan Banten Kidul ini memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Pada Pilkada 2020 data dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Sukabumi menunjukkan bahwa dari 358 DPT sebanyak 224 menggunakan hak pilih. Artinya partisipasi memilih masyarakat Kasepuhan Ciptagelar pada Pilkada 2020 mencapai 62,4%.

Tabel 1. Data Penguin Hak Pilih di TPS 7 Kasepuhan Ciptagelar pada Pilkada 2020

| | Jumlah DPT | Pindah Memilih | Pengguna Hak Pilih |
|-----------|------------|----------------|--------------------|
| Laki-laki | 187 | 1 | 126 |
| Perempuan | 171 | | 98 |
| Total | | 359 | 224 |

Selain partisipasi yang aktif, Kasepuhan Ciptagelar juga mendapatkan penobatan sebagai Desa Anti Money Politic pada 2020 tepatnya sebelum Pilkada 2020 oleh Bawaslu RI. Dari penobatan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menunjukkan partisipasi aktif dalam aktivitas politik. Peran pemerintah melalui lembaga kepemiluan juga menjadi poin penting dalam membentuk budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat adat terdorong untuk melaksanakan nilai kepatuhan yang dipegang teguh sejak dulu. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin meneliti tentang budaya politik masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar pada Pilkada 2020.

Studi ini mengkaji dengan menggunakan teori Budaya Politik. Gabriel Almond dan Sidney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap individu terhadap sistem dan komponen-komponennya, dan sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. Almond dan Verba juga mengemukakan budaya politik suatu masyarakat dihayati melalui kesadaran masyarakat akan pengetahuan, perasaan, dan evaluasi masyarakat tersebut yang berorientasi pada:

- a. Orientasi kognitif berhubungan dengan pendidikan politik masyarakat. Se jauh mana masyarakat memahami dan mengetahui tentang sistem politik, aktor beserta perannya, hingga tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Orientasi afektif merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik dan perannya, serta para pelaksana dan penampilannya. Perasaan masyarakat tersebut bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem politik atau kebijakan yang dibuat.
- c. Orientasi evaluatif merupakan opini serta penilaian masyarakat terhadap sistem politik yang berjalan. Masyarakat memiliki pendapat tentang objek politik yang melibatkan standar nilai dan kriteria, diiringi dengan informasi yang didapat dan perasaan.

Budaya politik masyarakat dibedakan menjadi 3 kategori yakni budaya politik apatis, mobilisasi dan partisipatif. Budaya politik apatis yang cenderung menunjukkan perilaku acuh dan pasif. Budaya politik mobilisasi yang terbentuk karena adanya mobilisasi atau sengaja didorong untuk menunjukkan sebuah partisipasi politik tertentu. Budaya politik partisipasi menunjukkan perilaku aktif pelaku politik dalam kegiatan sistem politik. Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- b. Tingkat ekonomi masyarakat; semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
- c. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).

- d. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
- e. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan John W. Creswell sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dengan berbagai Teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Pada penelitian ini penulis mengambil data dari lembaga pemilihan yaitu Bawaslu dan KPU.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi dan pimpinan adat Kasepuhan Ciptagelar yang bertugas membawahi aktivitas politik kasepuhan.

b. Data Sekunder

Penulis mengumpulkan beberapa data dari literatur dan dokumen. Dokumen yang akan dikumpulkan berupa profil Kasepuhan Ciptagelar beserta nilai dan falsafah hidup. Selanjutnya data laporan hasil Pilkada 2020 di Desa Ciptagelar. Data dapat diperoleh dari lembaga pemilihan yakni KPU Kab. Sukabumi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menganalisa fenomena yang terjadi pada masa sekarang. Teknik tersebut dilakukan dimulai dengan proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian menafsirkan data secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya politik masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dipengaruhi oleh karakter, prinsip, dan nilai budaya yang dianut. Maka penelitian membahas ketiga aspek tersebut untuk menganalisis dinamika budaya politik masyarakat Kasepuhan Ciptagelar.

a. Struktur Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

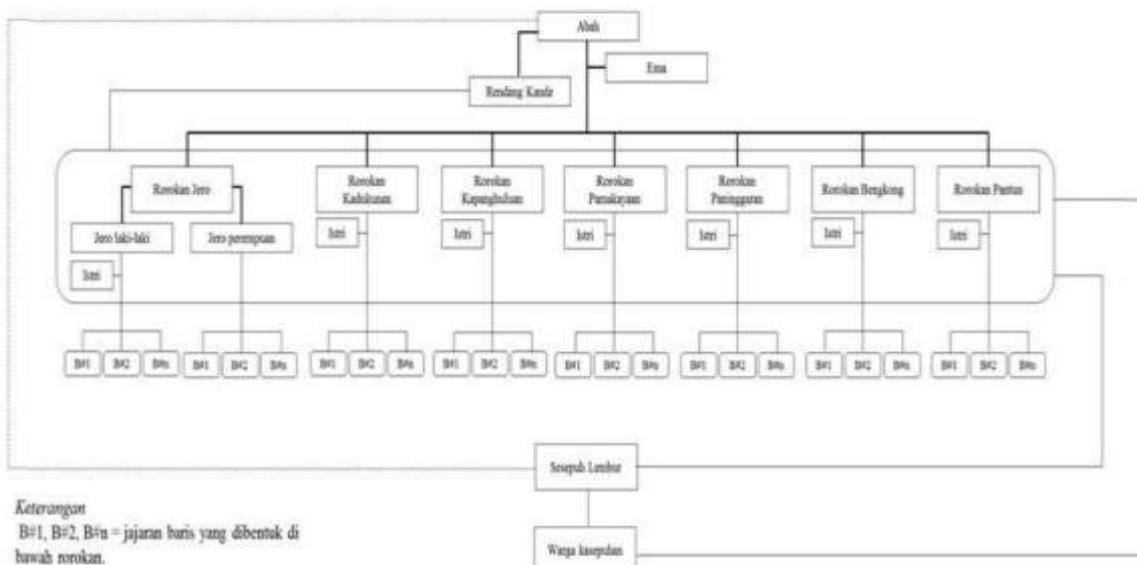
Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar umumnya merupakan petani dan bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan. Penjelasan terkait pembagian tugas dan peran digambarkan melalui Tabel 2. Jarak yang jauh dari sekolah menjadi kendala bagi masyarakat Kasepuhan untuk sekolah. Meskipun kini sudah banyak yang mulai sadar akan pendidikan formal, namun tidak sedikit yang memilih untuk tidak sekolah. Meskipun berada di bawah hukum adat,

masyarakat adat tidak dilarang untuk merantau dalam rangka menuntut ilmu.

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menjalani kehidupan berdasarkan hukum adat yang berlaku di bawah kepemimpinan Kepala Adat yang disebut Abah. Abah merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat kasepuhan yang didampingi oleh seorang Emak (ibu).

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, Abah dibantu oleh rendang kande yaitu ajudan. Ada pula Rorokan yang telah diatur secara spesifik peran dan tanggung jawabnya. Untuk mengontrol seluruh masyarakat kasepuhan, Abah dibantu oleh kolot lembur atau sepuh lembur yang menjadi perwakilan dari setiap dusun atau kampung dari kasepuhan. Selain itu ada pula baris rendangan yang wakil dari keluarga yang dituakan.

Lembaga adat dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 1. Struktur Lembaga Adat Kasepuhan Ciptagelar

Tabel 2. Peran Tokoh Adat

| Tokoh | Peran |
|----------------------------|--|
| Abah | Bapak masyarakat Adat yang memastikan praktik adat berkelanjutan |
| Ema | Istri dari Abah |
| Rendang Kande | Layaknya asisten pribadi Abah, bertugas membawakan segala keperluan adat abah |
| Rorokan Jero | Bertanggung jawab untuk mengurus keperluan imah gede |
| Rorokan Kadukunan | Bertanggung jawab memimpin semua ritual adat |
| Rorokan Kepenghuluan | Bertanggung jawab untuk memimpin doa dalam upacara adat |
| Rorokan Pamakayaan | Bertanggung jawab atas semua kegiatan pertanian |
| Rorokan Panninggaran | Keamanan (spritual) dalam pertanian |
| Rorokan Bengkong | Bertanggung jawab untuk proses khitan atau sunatan |
| Rorokan Pantun | Petugas yang mengadakan pertunjukan kesenian pantun untuk pencerahan bagi anak cucu. |
| Sesepuh lembur/Baris Kolot | Pembimbing penasehat yang memberikan pertimbangan kepada abah. |

Proses pergantian kepemimpinan dilakukan dengan sistem turun-temurun. Sistem ini berlaku untuk semua peran tidak terkecuali pada pemimpin adat. Misalnya seorang Rorokan Jero akan menurunkan perannya ke anak laki-lakinya, begitu pun semua Rorokan. Namun untuk Rorokan yang berperan dalam membantu persalinan ibu dan bayi, hanya dilakukan oleh perempuan dan diturunkan pula hanya pada anak perempuan.

Selain pekerjaan yang tertera pada struktur, terdapat pula pekerjaan titipan yang hanya ada ketika dibutuhkan. Jenis pekerjaan ini tidak seperti pekerjaan tetap

yang diturunkan secara turun temurun, melainkan dapat diemban oleh siapa pun sesuai kehendak Abah. Di antara pekerjaan titipan tersebut adalah pekerjaan yang berperan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas politik. Komitmen Kasepuhan untuk terbuka dalam aktivitas politik ditunjukkan dengan diberikannya akses bagi orang yang berperan dalam bidang politik untuk belajar tentang politik di luar Kasepuhan.

b. Karakter Masyarakat Kasepuhan

Ramadan, Djono, dan Suryani membagi kearifan lokal Kasepuhan Ciptagelar menjadi dua yaitu *tengible* dan *intengible*. Kearifan lokal *tengible* adalah kearifan lokal yang berwujud nyata. Kearifan lokal ini salah satunya dapat dilihat dalam bentuk bangunan. Dalam hal ini kasepuhan Ciptagelar masih melestarikan kearifan lokalnya dalam bentuk nyata terlihat dalam bangunannya masih menyesuaikan dengan adat istiadat yang berlaku.

Imah Gede merupakan rumah yang dirancang khusus untuk Abah, di rumah itu menjadi pusat dari kegiatan kebudayaan. Rumah tersebut menjadi tempat untuk menerima tamu yang ingin berkunjung ke wilayah adat.

Selanjutnya, Leuit bangunan yang mempunyai fungsi sebagai penyimpan padi. Leuit menjadi salah satu bangunan yang memiliki aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Keberadaan Leuit menjadi identitas dan pola kepatuhan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur. Kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar sangat erat dengan pertanian, khususnya padi. Maka dari itu, padi menjadi salah satu tanaman yang disakralkan dan tidak ada aspek ekonomi didalamnya. Setiap perpindahan wilayah adat, Leuit menjadi bangunan yang wajib untuk dibangun karena merupakan simbol kepatuhan dan kemandirian masyarakat adat.

Tidak hanya terlihat dalam bangunan, kearifan lokal dalam wujud nyata juga terlihat dari tradisi seni dan

budaya. Seperti obyek sejarah, manuskrip cerita rakyat & wawacan yang menjadi bagian dari adat, tradisi, serta ritual budaya di kalangan warga Kasepuhan Ciptagelar. Kesenian yang berkembang diantaranya alat musik Dog-dog Lojor, seni jipeng, topeng, debus, gondang, toleat, calung, karinding, dan pakaian adat.

Kemudian, kearifan lokal *itengible* adalah kearifan lokal yang tidak berwujud nyata. Kearifan lokal ini berisi nilai-nilai tradisional yang masih dilestarikan. Kasepuhan Ciptagelar memiliki nilai kearifan lokal tidak berwujud yang diwariskan secara turun temurun sebagai berikut;

a. Peduli lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan dituangkan dalam hukum adat yang berlaku di Kasepuhan Ciptagelar. Hutan memiliki fungsi yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar. Kehidupan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak dapat dipisahkan dari hutan karena menurut adat Kasepuhan Ciptagelar hutan merupakan instrumen penting dalam menyangga kehidupan dan memenuhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar membagi hutan menjadi tiga sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan ini berupa pembagian hutan menurut pemanfaatannya yaitu hutan garapan, hutan tutupan dan hutan titipan. Hutan garapan adalah hutan yang diperbolehkan untuk masyarakat memanfaatkan lahan tersebut. Hutan tutupan adalah hutan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun terkecuali atas izin Abah. Terakhir, hutan titipan adalah hutan yang diperbolehkan masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan seizin kasepuhan.

b. Soliditas sosial

Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar terkenal dengan soliditasnya. Hal ini bisa dilihat dari tradisi ngalalakon yakni tradisi berpindah yang sudah dilakukan sejak berabad-abad silam. Tradisi ini masih dilakukan oleh

Kasepuhan Ciptagelar dibandingkan dengan kasepuhan lainnya yang tergabung dalam wilayah adat Banten Kidul. Dalam melakukan tradisi ngalalakon, semua masyarakat bekerjasama untuk membuka wilayah baru sesuai dengan arahan wangsit yang diterima oleh Abah. Masyarakat akan membangun keseluruhan bangunan secara bergotong royong. Tidak hanya itu, dalam konteks politik masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menunjukkan soliditasnya. Saat pemilihan kepala desa mereka secara otomatis akan memilih seorang kepala desa yang memiliki latar belakang keturunan dari wilayah kasepuhan. Hal itu didorong untuk menjaga keutuhan dari tradisi.

c. Demokratis

Dalam memutuskan sebuah kebijakan seorang Abah tidak secara absolut untuk memberikan perintah. Seorang Abah akan melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil. Musyawarah dilakukan dengan para tetua kasepuhan atau baris kolot. Dalam hal suatu keputusan, masyarakat Kasepuhan selalu membahasnya terlebih dahulu secara adil. Termasuk dalam konteks menentukan pilihan politik. Abah tidak memaksakan pilihannya untuk diikuti oleh seluruh masyarakat adatnya, walaupun memang secara otomatis akan diikuti karena kultur masyarakat yang manut pada Abah. Abah akan melakukan musyawarah dan memberikan pendapatnya tentang calon kepada para rorokan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, hasil musyawarah itu tidak dipaksakan kepada masyarakatnya.

d. Jujur

Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar memiliki keterikatan dengan hukum adat yang mengharuskan berperilaku jujur. Kasepuhan Ciptagelar mempercayai bahwa mereka terikat dengan suatu hukum yang tidak tertulis, bahwa siapapun melanggar akan mendapatkan hukuman secara sosial ataupun spritual. Hukuman tersebut disebut sebagai kabendon (mendapatkan kesialan). Sikap jujur yang tertanam pada masyarakat Ciptagelar direfleksikan 8

pada pepatah *mipit kudu alit, ngala kudu menta, make suci, dahar halal ulah maen kartu, maen dadu, madat, jinah, ngrinah tanpa wali*. Pepatah tersebut berarti memilih harus izin, mengambil harus bertanya, apa gunanya suci atau bersih, makan yang halal, jangan berjudi, menikah sebelum menikah.

e. Tanggung jawab

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar sudah memiliki dan tahu akan perannya. Hal itu terlihat dalam sistem struktural Kasepuhan yang dikenal dengan rorokan, terdapat bagiannya masing-masing dalam menjalankan setiap kehidupannya. Salah satunya, dalam bidang pertanian terdapat rorokan khusus yang mengurus pertanian disebut sebagai tetanen. Namun, masyarakat yang tidak termasuk kedalam rorokan juga tahu akan fungsinya masing-masing sesuai dengan garis keturunan yang diwarisi oleh para lelehurnya.

f. Kreativitas

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak anti dalam perkembangan zaman. Namun mereka membatasi budaya luar yang masuk ke dalam wilayah. Mereka yang memiliki tradisi bahwa hidup secara mandiri terlihat bagaimana kreatifitasnya mereka dalam memanfaatkan apa pun yang bisa menunjang mereka untuk sejalan dengan zaman. Hal itu terlihat dengan mereka mempunyai channel TV maupun radio milik sendiri yang menyiarkan kehidupan keseharian mereka. Tidak hanya itu, mereka membuat PLTA (Pembangkit listrik Tenaga Air) milik mereka sendiri.

c. Prinsip dan Nilai Hidup Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

Kasepuhan Ciptagelar termasuk ke dalam sebuah masyarakat adat Banten Kidul yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Di wilayah tersebut terdapat tiga kasepuhan yang tergabung ke dalam masyarakat adat Banten Kidul yakni Kasepuhan Sinaresmi, Kasepuhan Ciptagelar, dan Kasepuhan Ciptamulia. Ketiga Kasepuhan tersebut memiliki

prinsip yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang tergambar dalam tiga simbol yakni *sara, nagara*, dan *mokaha*. Ketiga simbol saling mengikat dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Sara berarti agama, *nagara* berarti pemerintahan, dan *mokaha* berarti aturan adat. Dalam wujud *sara*, di samping masyarakatnya menggunakan aturan adat tetapi tetap tidak melepaskan aturan-aturan yang berada dalam lingkup agama. Simbol ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat adat berlandaskan nilai-nilai dan kepercayaan pada agama yaitu Islam. *Nagara* atau pemerintahan. Kasepuhan memiliki sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan, namun tetap mengikuti aturan negara yang berpedoman pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan aturan hukum lainnya. *Mokaha* atau aturan adat. *Mokaha* menjadi pedoman tertinggi tidak tertulis yang wajib untuk diikuti oleh masyarakat Kasepuhan. Hukum adat bersifat kepercayaan yang sanksinya bukan datang dari Ketua Adat melainkan dari leluhur atau disebut *Karuhun*. Ketiga simbol itu harus berjalan secara beriringan tidak boleh ditinggalkan baik satu ataupun dua simbol tersebut.

Prinsip ini menjadi jati diri masyarakat adat. Oleh karenanya kehidupan masyarakat adat tidak akan terlepas pada tiga simbol yang dipercaya apabila hilang salah satu maka akan timbul ketidakseimbangan. Masyarakat Kasepuhan percaya bahwa ketiga simbol itu harus dipegang teguh. Maka apabila membahas terkait aktivitas politik, masyarakat Kasepuhan tentu tidak apatis karena itu bagian dari simbol *nagara*. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tetap menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga negara, di antaranya mengikuti proses penyelenggaraan pemilu.

Masyarakat tetap mengikuti semua proses alur tahapan dalam pemilu. Keberadaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar tidak bertolak belakang dengan aturan hukum yang dimiliki oleh negara. Namun tetap dilakukan penyesuaian dalam sistem dan pengelolaan kehidupan masyarakatnya. Perbedaan seperti sistem

yang dikhususkan kepada masyarakat adat lainnya tidak ditemui di Kasepuhan Ciptagelar. Selagi politik itu tidak mengganggu kehidupan dan aturan adat akan dijalani sesuai dengan aturan yang harus dijalankan.

d. Dinamika Budaya Politik Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memiliki ketertarikan pada isu politik terlebih saat pemilihan. Meskipun dari segi pendidikan politik masyarakat Kasepuhan hanya mendapat edukasi yang intens terkait proses penyelenggaraan Pemilu saja. Hal ini dibuktikan dengan angka partisipasi pemilih yang tercatat sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1. Bawaslu Kabupaten Sukabumi, tidak memiliki catatan pelanggaran Pemilu di TPS 7 (Kasepuhan Ciptagelar) yang ada di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok. Namun masyarakat adat menjadi salah satu sasaran program sosialisasi oleh Bawaslu karena termasuk pada isu dalam Indeks Kerawanan Pemilu.

1. Pengetahuan Politik dan Ketersediaan Informasi

Setiap masa pemilihan datang, masyarakat Kasepuhan tidak sungkan bertanya pada pihak terkait dalam hal ini Ketua Bidang Politik yang ditugaskan oleh Abah untuk bertanya dan berdiskusi. Pengetahuan masyarakat tentang politik dan penyelenggaraan Pemilu dilakukan melalui beberapa saluran. Pertama dari lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

Pada September 2020 Bawaslu Republik Indonesia melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus memberikan penobatan Desa Anti Money Politic pada Kasepuhan Ciptagelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi pemilih. Bawaslu RI bersama Bawaslu Kabupaten Sukabumi berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat Kasepuhan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2020 yang digelar 9 Desember 2020.

Saluran lainnya dari KPU yang umumnya memberikan sosialisasi tentang tahapan Pemilu untuk meningkatkan

partisipasi pemilih. Namun pada Pilkada 2020 KPU Kab. Sukabumi tidak ada program sosialisasi di Kasepuhan Ciptagelar karena tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang dinilai tinggi dari hasil Pemilihan Gubernur pada 2018. Maka KPU Kab. Sukabumi lebih fokus melakukan sosialisasi di daerah yang masih minim partisipasi.

Sementara itu pengetahuan masyarakat tentang calon Kepala Daerah bersumber pada saluran media digital seperti media sosial dan televisi dengan didukung oleh jaringan internet yang memadai. Masyarakat mengenal para Calon Kepala Daerah tidak hanya dari kampanye langsung yang diselenggarakan oleh calon maupun partai politik di wilayah Kasepuhan. Meskipun lokasi Kasepuhan berada di Gunung Halimun dan cukup jauh dari pusat kota, akan tetapi Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat adat modern yang tidak tertutup pada perkembangan zaman dan teknologi.

Kasepuhan Ciptagelar menerima bantuan dan kerja sama dengan lembaga non-profit asal Indonesia yaitu Common Room yang juga didukung oleh Kedutaan Inggris pada 2020 untuk membangun jaringan internet. Proyek tersebut dimulai sejak akhir 2019 dan diresmikan pada Oktober 2020. Tidak hanya membangun jaringan internet, masyarakat Kasepuhan juga diberikan edukasi dan pelatihan melalui program Rural ICT Camp 2020. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat merawat jaringan internet yang telah dibangun sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat berkelanjutan.

Sebelum kerja sama dengan Common Room dalam program tersebut, masyarakat Kasepuhan memang telah memiliki dan menggunakan teknologi di antaranya televisi. Kini barang elektronik seperti telepon seluler, *smart phone*, laptop, kamera, dan barang elektronik lainnya dapat ditemukan di kalangan masyarakat Kasepuhan. Teknologi tersebut yang kemudian mendukung proses perpindahan informasi baik dari luar ke dalam (masyarakat Kasepuhan) maupun sebaliknya.

Keterbukaan Kasepuhan Ciptagelar pada perkembangan teknologi didukung pula oleh Ketua Adat Abah Ugi yang memiliki kegemaran di bidang elektronik. Hingga saat ini Ciptagelar memiliki stasiun televisi yaitu Ciga TV yang menayangkan kehidupan sehari-hari masyarakat Ciptagelar. Ketersediaan listrik juga disokong oleh turbin yang dirakit mandiri untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Ciptagelar. Dengan begitu, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses komunikasi politik selama penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Namun begitu, tingkat pengetahuan politik masyarakat Kasepuhan secara umum masih rendah. Hal ini selaras dengan tingkat pendidikan masyarakat Kasepuhan yang rata-rata tidak sampai SMA.

2. Cita-cita Politik Kasepuhan Ciptagelar dan Proses Penentuan Pilihan Politik

Kasepuhan Ciptagelar memiliki cita-cita politik yang ditunjukkan dari sikap selektif dan evaluatif terhadap pemimpin pemerintahan. Abah sebagai pemimpin tertinggi di Kasepuhan tidak menentukan secara sepihak melainkan melibatkan Kolot Lembur dan seluruh Rorokan. Proses penentuan pilihan politik baik dalam Pilkada maupun Pileg dilakukan melalui dialog dan musyawarah. Kasepuhan Ciptagelar memiliki daya tarik tersendiri bagi para Calon Kepala Daerah maupun dalam konteks Pileg. Meskipun jumlah DPT di Kasepuhan Ciptagelar tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan wilayah lainnya, akan tetapi Kasepuhan memiliki relasi yang cukup luas. Dalam hal ini pilihan politik Kasepuhan bisa saja berpengaruh pada pilihan orang di luar Kasepuhan karena relasi yang terjalin erat antara masyarakat umum dengan Kasepuhan. Misalnya keturunan adat yang sudah tidak tinggal di wilayah Kasepuhan, atau orang yang memutuskan untuk bergabung dengan kehidupan Kasepuhan meskipun tidak tinggal di Kasepuhan dimungkinkan akan mengikuti pilihan yang ditetapkan oleh Kasepuhan.

Sebagaimana karakteristik masyarakat adat yang patuh pada keputusan dan kebijakan Abah, Calon Kepala Daerah melakukan pendekatan melalui Abah. Proses penentuan pilihan politik melalui beberapa tahap. Pertama, Calon Kepala Daerah berkunjung ke Abah dalam rangka memohon restu dan dukungan sekaligus memberikan media kampanye berupa spanduk atau poster kampanye.

Selanjutnya, Abah mendapatkan beberapa nama calon, selanjutnya akan diadakan forum diskusi dan dialog untuk membahas latar belakang dan seluruh hal yang berkaitan dengan calon yang bersangkutan bersama Rorokan dan Kolot Lembur. Pada forum tersebut Rorokan dan Kolot Lembur dimintai pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan politik adalah kepentingan Kasepuhan misalnya dalam hal fasilitas umum, ketersediaan kebutuhan yang menyangkut pendidikan dan jalur ekonomi.

Cita-cita politik ini juga ditunjukkan dalam setiap agenda pemilihan, misalnya pada Pilkada 2017. Masyarakat Kasepuhan memiliki bahan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa Sirnaesmi Periode 2011-2017 yang dianggap kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat adat yang berada di Sirnaesmi. Oleh karenanya pada Pilkada 2017 tiga Kasepuhan yang ada di Sirnaesmi mengambil sikap untuk mengusung Calon Kepala Desa dari keturunan adat. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan dan aspirasi masyarakat adat dapat terakomodir. Masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa apabila desa dipimpin oleh masyarakat adat, maka tidak hanya kepentingan adat tapi kepentingan masyarakat secara umum akan diakomodir.

Forum dialog kemudian akan menghasilkan satu nama calon yang menjadi pilihan Kasepuhan. Abah memberikan tugas dan peran pada Ketua Bidang Politik Kasepuhan untuk menginformasikan dan

mengkomunikasikan hasil dialog pada masyarakat Kasepuhan.

Calon yang menjadi pilihan Kasepuhan memiliki kesempatan untuk hadir dan terlibat dalam acara-acara adat. Tidak hanya hadir dan menyaksikan, akan tetapi calon pilihan Kasepuhan memiliki posisi yang berbeda. Pertama dilihat dari posisi duduk, dapat dipastikan akan duduk di sebelah Abah menghadap masyarakat. Kedua, calon terpilih mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan meskipun bukan kampanye secara terbuka (*hard selling*). Apabila ada kondisi tersebut dalam acara, masyarakat adat umumnya memahami bahwa calon yang bersangkutan merupakan pilihan yang telah ditentukan oleh Kasepuhan. Namun akan diperjelas oleh informasi yang dibawa oleh Ketua Bidang Politik.

3. Partisipasi Masyarakat Kasepuhan Pada Aktivitas Politik

Ketua Bidang Politik Kasepuhan Ciptagelar Sodong, menyatakan bahwa dinamika setiap pemilihan di Kasepuhan berbeda-beda. Misalnya pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Desa jika dibandingkan dinamikanya akan sangat berbeda. Pada Pemilihan Kepala Desa lebih dinamis dibandingkan Pilkada. Hal ini dikarenakan posisi Kepala Desa yang lebih dekat dengan masyarakat dari pada Kepala Daerah, Presiden maupun DPR/DPRD. Maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih terasa dan berdampak bagi masyarakat adat.

Pada konteks Pilkada dan Pileg, masyarakat adat umumnya cukup berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh lembaga penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu, serta menggunakan hak suara. Sementara pada pemilihan Kepala Desa, masyarakat Kasepuhan tidak hanya menggunakan hak pilih, melainkan turut terlibat dalam tim pemenangan.

Masyarakat kasepuhan Ciptagelar menyadari bahwa disamping mengikuti aturan adat kasepuhan, akan tetapi mengikuti juga aturan pemerintah. Kasepuhan Ciptagelar masuk ke dalam desa Sirnaresmi, begitupun ketiga

kasepuhan lainnya. Hal itu mengikat di tiga prinsip hidup masyarakat kasepuhan Ciptagelar, dalam konteks tersebut yakni prinsip nagara. Desa Sirnaresmi yang terdiri dari tiga Kasepuhan masuk ke dalam kategori desa administratif. Desa Sirnaresmi ikut menjadi pelaksana implementasi kebijakan pemerintah. Namun, terdapat perberbedaan dalam segi penerapan kebijakan. Segala kebijakan yang diterapkan di desa akan melalui proses musyawarah dengan Kasepuhan baik itu pembangunan, pemberdayaan, maupun pemerintahan.

Desa akan menentukan arah kebijakan dengan melakukan musyawarah bersama Kasepuhan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Secara hukum formalistik, kebijakan desa merupakan tingkat tertinggi namun secara konteks kondisi ril, masyarakat adat menempatkan Kasepuhan di atas pemerintah desa. Ketika program yang telah dimusyawarahkan tidak sesuai dengan regulasi akan dilakukan koordinasi untuk kembali menyesuaikan.

Keadaan tersebut yang membuat masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar sangat menaruh perhatian pada Pemilihan Kepala Desa. Konstelasi pemilihan kepala desa cenderung lebih dinamis dibandingkan dengan yang lainnya. Hal itu karena, masyarakat adat kasepuhan menyadari regulasi yang paling mendekati dengan kehidupan mereka adalah aturan yang ada di desa.

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar ataupun yang lainnya tidak membatasi ruang demokrasi untuk mereka yang tidak berlatarbelakang keturunan kasepuhan untuk ikut terlibat dalam pencalonan. Namun, mereka punya penilaian sendiri bahwa ketika dipimpin dengan latarbelakang yang sama, mereka mendapatkan garansi kepentingan adat akan diutamakan.

Masyarakat kasepuhan akan turut aktif dengan melakukan kampanye mendukung calon yang dipilihnya. Kampanye itu dilakukan dengan berbagai cara mulai dari datang dari rumah ke rumah maupun membuat alat peraga kampanye seperti baliho yang informatif. Tidak hanya itu, menurut Sodong ketua

bidang politik kasepuhan Cipategelar juga menyampaikan bahwa masyarakat akan jauh lebih aktif bertanya mengenai bakal calon dan siapa yang harus mereka dukung ketika pemilihan desa. Berbeda dengan pemilihan kepala daerah ataupun presiden, walaupun kebijakannya akan berdampak kepada mereka tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap dukungan atau ketertarikan. Masyarakat Ciptagelar hanya bersifat partisipatif tetapi tidak aktif terlibat.

4. KESIMPULAN

Secara umum orientasi kognitif masyarakat Kasepuhan Ciptagelar belum menunjukkan wajah yang signifikan karena tidak memahami secara komprehensif bagaimana sebuah sistem politik berjalan. Namun memiliki rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap pemimpin dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Penentuan pilihan politik Kasepuhan dilakukan pada level perwakilan. Abah, Rorokan dan Kolot Lembur dianggap memiliki kemampuan lebih dalam menentukan pilihan.

Sementara orientasi afektif masyarakat Kasepuhan dapat dilihat dari sikap dalam menerima kebijakan pemerintah dalam hal Pilkada. Kasepuhan Ciptagelar sangat terbuka dalam menerima kedatangan lembaga pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas sesuai UU. Contoh konkrit yang ditunjukkan di antaranya sosialisasi oleh Bawaslu RI sehingga Kasepuhan mendapatkan penobatan sebagai Desa Anti Money Politic.

Kemudian, orientasi evaluatif terlihat dalam sikap selektif yang dimiliki pimpinan adat dalam menentukan pilihan politik dengan berdasarkan pertimbangan nilai dan kriteria standar.

Dinamika budaya politik masyarakat Kasepuhan Ciptagelar pada Pilkada 2020 tidak terlalu dinamis. Akan tetapi masyarakat Kasepuhan termasuk ke dalam budaya politik partisipasi yang menunjukkan perilaku aktif pelaku politik dalam kegiatan sistem politik.

Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Kasepuhan dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilu

yaitu sebelum dan saat pemilihan. Masyarakat memiliki rasa peduli terhadap pilihan politik, turut serta dalam dialog dan diskusi dalam proses penentuan pilihan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Subhan. (2007). Pemerintahan Asli Masyarakat Adat. Deepublish.
- Aini, Siti N. (2022). Konsep Kesalingan Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar. Jurnal Ilmiah Citra Ilmu Edisi 18 Vol 36.
- Almond, Gabriel A., & Verba, Sidney. (1990). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Arum Dayu. (2020). Pembangunan & Pemanfaatan Media Lab Kasepuhan Ciptagelar. Diakses melalui <https://commonroom.info/>
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Dokumentasi KPU Kab. Sukabumi.
- Creswell, John W. (1994). Research Design Quantitative & Qualitative Approach, London: Sage Publication, Inc.
- Iskandar, Gustaff H. 2023. Lokakarya Budaya, Jenama, Kota dan Cipta Ruang.
- Meidiana, Dinar. Wawancara dengan Sodong Ketua Bidang Politik Kasepuhan Ciptagelar. 10 September 2023.
- Meidiana, Dinar. Wawancara dengan Abah Asep Nugraha Ketua Adat Sirnaresmi. 10 September 2023.
- Meidiana, Dinar. Wawancara dengan Ferry Gustaman Komisioner KPU Kab. Sukabumi 7 September 2023.
- Meidiana, Dinar. Wawancara dengan Vilkamandala Sekretaris Desa 7 September 2023.
- Miranti, Binakti. Sediakan Internet untuk Desa di Jabar, Kedutaan Inggris Kucurkan Dana Hingga Rp 3,5 M.

<https://www.liputan6.com/global/read/4257507/sediakan-internet-untuk-desa-di-jabar-kedutaan-inggris-kucurkan-dana-hingga-rp-35-m>

Partisipatif Warga Adat Cipta Gelar Dalam Pilkada 2020. Kanal Youtube Kompas TV Sukabumi.11 September 2020.

Saleh, Khoirul, & Munif, Achmat. (2015). Jurnal Addin Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. 9 (2).

Surachmad, Winarno. (1980). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Edisi ke-7. Bandung: Tarsito.

Watchdoc Image.(2016, 29 November 2015). Kasepuhan Ciptagelar. <https://www.youtube.com/watch?v=ZVoNkADi2dc&t=7s>